**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai masalah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yaitu pengaruh *intergovernmental revenue*, indeks pembangunan manusia, kekayaan daerah, dan opini audit terhadap pengungkapan sukarela pemerintah daerah di pulau Sumatera pada tahun 2018. Selain dari uraian latar belakang masalah di atas, bab ini juga akan menjelaskan mengenai identifikasi dari berbagai masalah yang akan terjadi, batasan dari setiap masalah yang muncul, batasan penelitian, rumusan masalah setelah dipersempit oleh batasan masalah yang ada, dan tujuan serta manfaat penelitian yang dilakukan bagi berbagai pihak.

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ada daerah otonom yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat diihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun kenyataan di pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut Dana Perimbangan. Hal ini sering dijumpai bahwa DAPER masih jauh lebih besar dari PAD (Kusumawardani, 2012).

Selain itu, tata kelola yang baik (*good governance)* harus melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Salah satu komponen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan adalah pengungkapan laporan keuangan (Wulandari dan Sulardi, 2018).

Pengungkapan laporan keuangan dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan laporan keuangan secara wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan laporan keuangan secara sukarela (*Voluntary Discloure*). Pengungkapan laporan keuangan secara wajib adalah pengungkapan laporan berisikan informasi yang wajib dikemukakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan pengungkapan laporan keuangan secara sukarela adalah pengungkapan yang menyajikan item-item lain di luar item wajib yang diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pengungkapan laporan keuangan secara wajib yang disampaikan oleh pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011) sedangkan untuk pengungkapan yang bersifat sukarela dalam *website* yang dilakukan oleh pemerintah juga masih sangat rendah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Pengungkapan laporan keuangan yang tidak transparan akan mengundang penyalahgunaan. Seperti yang dilansir dari Republika.co.id, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai, kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. "Terutama korupsi di sejumlah pemerintahan daerah," kata Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Pusat, Nunuy Nurafiah di Graha Widyaloka Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (3/5). Menurut Nunuy, IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pelaksanaan tugas pemerintah, termasuk penyampaian informasi publik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Salah satu media yang mudah dan efisien digunakan adalah melalui website resmi pemerintah daerah. Melalui Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan pelaksanaan pemerintahan berbasis internet atau yang biasa dikenal dengan *e-government* ( Rahim dan Martani, 2015 ).

Penerapan *e-government* di Indonesia pada saat ini telah dilakukan pada pemerintah pusat, kementrian Negara, dan pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan *e-government* berupa penyediaan situs web resmi dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. *E-government* di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak tahun 2001. *E-government* dikenalkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal 24 April 2001. Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika). Instruksi tersebut menjelaskan bahwa untuk mendukung terciptanya *good governance* dan meningkatkan demokrasi, maka aparat pemerintah diwajibkan untuk menggunakan teknologi telematika. Hal ini mengimplikasi bahwa hingga saat ini *e-government* di Indonesia telah diterapkan selama kurang lebih 16 tahun (2001-2017) (Putra. et al 2018).

Penerapan *e-government* di Indonesia pada saat ini tidak hanya pada pemerintah pusat dan kementrian Negara saja, namun juga telah dilakukan sampai pada pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan *e-government* berupa penyediaan situs web resmi dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia (Putra. et al 2018).

Penyajian informasi pemerintah kepada publik lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi, dengan begitu kinerja pemerintah bisa lebih efektif, efisien, dan transparan terhadap masyarakat. Beberapa peraturan di Indonesia menyebutkan mengenai pemanfaatan media komunikasi dapat membantu untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat, peraturan itu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007. Peraturan-peraturan tersebut menerangkan bahwa media komunikasi yang dimaksud adalah media cetak atau elektronik yang tersedia di daerah (Wulandari dan Sulardi, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah paling sedikit harus memuat informasi tentang APBD dan realisasinya, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal daerah. Hal ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, menjelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat sebuah *website* yang berisikan kelengkapan fitur dan informasi transparansi laporan keuangan daerah yang dapat dilihat masyarakat. Bagi pemerintah *website* menjadi salah satu hal penting dalam keterbukaan informasi publik. Situs resmi yang dimiliki pemerintah daerah bisa menjadi media informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi publik (Wulandari dan Sulardi, 2018).

Beberapa penelitian mengenai pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Indonesia, antara lain oleh Lesmana (2010) dengan data tahun 2007 sebesar 22%, dan Syafitri (2012) dengan data tahun 2008-2009 sebesar 52,09%, sedangkan penelitian pengungkapan LKPD provinsi oleh Hilmi dan Martani (2012) dengan data tahun 2006-2009 menunjukkan sebesar 44,56%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan rendahnya tingkat pengungkapan wajib, yang berarti pemerintah daerah belum memahami pentingnya pengungkapan laporan keuangan sesuai standar.

Rendahnya tingkat pengungkapan wajib berdampak pada opini audit atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK masih sangat sedikit. Berdasarkan data opini laporan keuangan pemerintah provinsi dari tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa persentase pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP masih rendah, akan tetapi mengalami kenaikan terus dari tahun ke tahun. Dari 0,00% pada tahun 2006, 3,03% tahun 2007, 0,00% tahun 2008, 3,03% tahun 2009, 18,18% tahun 2010, 30,30% tahun 2011, 51,52% pada tahun 2012, 29,96% tahun 2013, 47% tahun 2014, dan 58% pada tahun 2015.

Sofia dan Husen (2013) menyatakan bahwa rata - rata indeks pengungkapan informasi keuangan terbukti lebih rendah dibandingkan non keuangan karena pemerintah daerah memilih mengungkapkan informasi yang dianggap “aman”. Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian terkait evaluasi perkembangan dan transparansi informasi keuangan pada e-government pemerintah daerah menjadi menarik dan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab dari tidak optimalnya perkembangan *e-government* tersebut. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi berbagai pihak sebagai saran perbaikan dalam penerapan *e-government* di Indonesia untuk dapat menciptakan transparansi informasi dan *good governance*. Hasil penelitian juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan referensi baru bagi berbagai pihak terkait manfaat dari penerapan *e-government* terhadap kehidupan masyarakat.

Karakteristik Pemda merujuk kepada sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh Pemda yang bersangkutan. Karakteristik dapat menunjukkan sifat yang melekat pada suatu objek, dalam hal ini adalah Pemda. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak memfokuskan kepada Karakteristik Pemerintah Daerah seperti; Jumlah SKPD, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan lain sebagainya. Di samping itu, lingkup penelitiannya antara provinsi, kabupaten, dan kota. Maka dari itu peneliti ingin menguji di Pulau Sumatera Pada Pengungkapan Sukarela *website* Pemerintah Daerah yang dipengaruhi oleh *Interngovernmental Revenue*, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit sehingga peneliti dapat membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang tidak spesifik kepada provinsi, kabupaten , dan kota.

Menurut beberapa hasil penelitian yang dilakukan Wulandari dan Sulardi (2018) membuktikan bahwa *Intergovernmental Revenue* (IR) mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela pada *website* Pemda. Sementara penelitian Puspita dan Martani (2012) membuktikan bahwa IR memengaruhi pengungkapan sukarela secara positif dan signifikan. Hasil berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian Lesmana (2010);Hilmi dan Martani (2012); Setyowati (2016) yang menunjukkan IR tidak memengaruhi pengungkapan LKPD.

Penelitian Sandhani (2014) membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah. Hal berbeda ditunjukkan oleh Liqoana (2016) yaitu IPM tidak memengaruhi pengungkapan sukarela dalam *website* Pemda.

Hasil penelitian yang dilakukan Hilmi dan Martani (2012) menunjukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil penelitian Wulandari dan Sulardi (2018) menunjukkan bahwa opini audit memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal berbeda ditunjukkan oleh Ardini (2015) yang membuktikan bahwa opini audit memengaruhi secara negatif terhadap transparansi laporan keuangan yang diungkapakan dalam *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Sukarela Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2018”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengindentifikasikan masalah – masalah sebagai berikut:

1. Apakah Total Pendapatan Daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
2. Apakah Total Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
3. Apakah *Intergovernmental Revenue* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
5. Apakah Kekayaan Daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah?
6. Apakah Opini Audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
7. **Batasan Masalah**

Dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki, serta agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah tanpa adanya hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah *Intergovernmental Revenue* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
3. Apakah Kekayaan Daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
4. Apakah Opini Audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah ?
5. **Batasan Penelitian**

Agar penelitian menjadi lebih terarah dan tujuan peneliti dapat dalam proses pengumpulan data dan analisis data, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Objek penelitian merupakan Laporan Keuangan dan Informasi Pemerintah Daerah yang berada di *website* Pemerintah daerah di Pulau Sumatera
2. Data yang diambil adalah periode 2018
3. Data penelitian menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit dan informasi laporan keuangan lainnya yang diperoleh dari *website* masing-masing Pemerintah Daerah serta Badan Pusat Statistik.
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka penelitian dirumuskan menjadi:

“Apakah *Intergovernmental* *Revenue,* Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera pada tahun 2018?”

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Intergovernmental Revenue memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah Indek Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui apakah Kekayaan Daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui apakah Opini Audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam *website* pemerintah daerah.
5. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak bagi beberapa pihak, diantarnya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji dan mengembangkannya.

1. Manfaat Praktis
2. Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan gagasan tentang kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai langkah perbaikan bagi pemerintahan di masing – masing dalam kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

1. Masyarakat umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.

1. Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian – penelitian yang sebelumnya.

1. Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.